

KERJASAMA PERTAHANAN INDONESIA DAN CHINA TAHUN 2022-2024

Sofyan Ardiyanto¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Ahmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

This study explores the evolving defense cooperation between Indonesia and China from 2022 to 2024, amid shifting geopolitical dynamics in the Indo-Pacific region. It investigates the underlying motivations, forms of collaboration, and challenges faced in the implementation process. Adopting a qualitative descriptive approach, the research highlights key areas of interaction, including joint military training, defense technology transfer, and defense diplomacy. The findings reveal that mutual strategic interests such as regional stability, capacity building, and strengthened bilateral relations serve as major driving forces. Nonetheless, tensions related to the South China Sea, diverging national interests, and domestic political dynamics remain as constraints. The study offers a nuanced understanding of how strategic trust and long-term vision can foster more effective defense partnerships in a contested regional landscape.

Keywords: Defense cooperation; Indonesia; China; regional stability; strategic trust.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dinamika kerjasama pertahanan antara Indonesia dan China pada periode 2022 hingga 2024, di tengah perubahan geopolitik kawasan Indo-Pasifik. Studi ini berfokus pada bentuk kerja sama yang dijalankan, kepentingan strategis yang mendasarinya, serta hambatan yang dihadapi dalam proses implementasi. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menyoroti berbagai aspek interaksi seperti latihan militer bersama, transfer teknologi pertahanan, dan diplomasi pertahanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stabilitas kawasan, peningkatan kapasitas pertahanan, serta penguatan hubungan bilateral menjadi faktor utama pendorong kerja sama ini. Namun demikian, isu Laut China Selatan, perbedaan kepentingan nasional, dan dinamika politik domestik menjadi tantangan yang masih perlu dikelola. Studi ini menekankan pentingnya kepercayaan strategis dalam membangun kerja sama pertahanan yang berkelanjutan.

Kata kunci: Kerjasama pertahanan; Indonesia; China; stabilitas kawasan; kepercayaan strategis.

PENDAHULUAN

Di tengah konstelasi global yang terus berubah, negara-negara semakin terdorong untuk memperkuat instrumen pertahanannya sebagai respons terhadap kompleksitas ancaman yang tidak lagi bersifat konvensional. Globalisasi, yang memfasilitasi konektivitas dan mobilitas tinggi antarnegara, justru menghadirkan tantangan baru berupa ketergantungan strategis dan potensi intervensi eksternal. Dalam konteks ini, sektor pertahanan tidak hanya menjadi alat keamanan, tetapi juga simbol kedaulatan dan kapasitas diplomatik suatu negara.

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik, memikul tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas kawasan sekaligus mempertahankan

integritas wilayahnya. Kendati Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara normatif telah menetapkan perlindungan seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia sebagai tujuan utama negara, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kekuatan pertahanan nasional masih menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya, teknologi, dan kesiapsiagaan. Di sinilah ketimpangan antara kondisi ideal (*das sollen*) dan realitas empiris (*das sein*) mengemuka, menuntut strategi adaptif dalam bentuk kerja sama pertahanan internasional.

Hubungan Indonesia-China menjadi salah satu relasi penting dalam lanskap keamanan kawasan. Keduanya memiliki kepentingan yang bersinggungan, baik dalam bidang militer, ekonomi, maupun politik luar negeri. Namun, dinamika ini tidak selalu linier. Di satu sisi, kerja sama pertahanan menjanjikan peningkatan kapasitas nasional; di sisi lain, ketegangan di Laut China Selatan, perbedaan orientasi strategis, serta resistensi publik terhadap pengaruh China memunculkan kompleksitas yang tidak dapat diabaikan.

Sayangnya, banyak studi sebelumnya hanya mengulas kerja sama ini dari sisi formal atau retorik, tanpa membedah secara mendalam bagaimana implementasi teknis dan realitas politik memengaruhi efektivitasnya. Artikel ini hadir untuk menutup kesenjangan tersebut. Dengan pendekatan kritis dan analitis, penelitian ini bertujuan mengungkap: (1) bentuk konkret kerja sama pertahanan Indonesia-China pada periode 2022-2024; (2) faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaannya; serta (3) potensi strategis kerja sama ini dalam kerangka kepentingan nasional Indonesia.

Sejumlah kajian terdahulu mengenai kerja sama pertahanan Indonesia masih dominan membahas hubungan dengan negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, dalam

kerangka aliansi strategis atau bantuan militer. Sementara itu, relasi dengan China lebih sering dianalisis dalam konteks ekonomi dan investasi, bukan pertahanan. Perspektif semacam ini menyisakan kekosongan dalam menjelaskan bagaimana Indonesia menavigasi kerja sama pertahanan dengan kekuatan besar yang tidak memiliki tradisi aliansi formal seperti China. Dalam konteks tersebut, studi ini tidak hanya mengisi ruang kosong tersebut, tetapi juga menawarkan analisis yang menekankan pentingnya *strategic hedging* dan diplomasi pertahanan adaptif dalam merespons lingkungan kawasan yang semakin multipolar dan berisiko tinggi.

KERANGKA ANALITIK

Diplomasi Pertahanan dan Strategic Hedging dalam Hubungan Asimetris Indonesia–China

Studi tentang kerja sama pertahanan dalam hubungan internasional tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas interaksi antara kepentingan nasional, kalkulasi strategis, dan konstelasi geopolitik global. Dalam konteks hubungan Indonesia dan China, kerja sama ini tidak berlangsung dalam ruang hampa, tetapi dipengaruhi oleh dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berubah. Oleh karena itu, untuk menganalisis isu ini secara sistematis, dibutuhkan

kerangka konseptual yang mampu menjelaskan dua hal: pertama, rasionalitas di balik keputusan negara untuk menjalin kerja sama pertahanan; kedua, bagaimana kerja sama ini dipraktikkan dalam situasi hubungan bilateral yang asimetris dan fluktuatif.

Diplomasi Pertahanan sebagai Pendekatan

Kerangka utama yang digunakan dalam studi ini adalah konsep diplomasi pertahanan (*defense diplomacy*). Istilah ini merujuk pada upaya negara dalam menggunakan instrumen militer-tidak untuk konfrontasi, tetapi sebagai alat diplomatik dalam rangka membangun kepercayaan, mencegah konflik, dan memperkuat hubungan bilateral atau multilateral. Menurut Cottey dan Forster (2004), diplomasi pertahanan mencakup berbagai aktivitas seperti kunjungan militer, dialog strategis, pelatihan bersama, bantuan teknis, dan pertukaran perwira. Dalam konteks hubungan Indonesia–China, kerja sama yang melibatkan latihan militer bersama dan pertukaran teknologi pertahanan dapat dikategorikan sebagai bentuk nyata dari diplomasi pertahanan ini.

Diplomasi pertahanan juga menjadi sarana bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk mengatasi kesenjangan kapabilitas militer, tanpa harus terjebak dalam pakta militer formal. Dalam hal ini, diplomasi pertahanan bukan sekadar alat bantu teknis, tetapi juga instrumen *soft power* untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam hubungan internasional, terutama dengan kekuatan besar seperti China.

Konsep Strategic Hedging

Untuk memahami posisi Indonesia yang tidak berpihak secara absolut terhadap satu kekuatan besar, digunakan pula konsep strategic hedging. Teori ini menjelaskan bagaimana

negara-negara kecil atau menengah merespons ketidakpastian sistem internasional dengan mengadopsi strategi campuran antara *balancing*, *bandwagoning*, dan *engagement*. Indonesia dalam hal ini tidak secara eksplisit beraliansi dengan China, tetapi tetap menjalin kerja sama yang bermanfaat, sembari mempertahankan hubungan dengan aktor lain seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia.

Strategic hedging memungkinkan negara untuk menjaga fleksibilitas kebijakan luar negeri dan menghindari eksese dari rivalitas kekuatan besar. Kerja sama pertahanan Indonesia-China, jika dilihat dari perspektif ini, bukan semata bentuk kepercayaan tinggi, tetapi juga cara Indonesia untuk menjaga ruang manuver dalam diplomasi kawasan. Dengan demikian, hedging dalam konteks ini lebih merupakan strategi antisipatif daripada sekadar ekspresi kedekatan ideologis.

Kompleksitas Hubungan Asimetris

Kerangka ini juga mengakomodasi kenyataan bahwa hubungan Indonesia dan China bukan relasi yang setara secara kekuatan militer, ekonomi, maupun diplomatik. Dalam hubungan asimetris semacam ini, kerja sama pertahanan berpotensi menciptakan ketergantungan jika tidak dikelola secara hati-hati. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis

bagaimana kerja sama dibingkai oleh aktor domestik dan internasional agar tidak menjadi instrumen hegemoni terselubung.

Pendekatan ini tidak bermaksud menolak kerja sama, tetapi ingin mengungkap titik-titik rawan ketimpangan yang dapat melemahkan posisi Indonesia secara strategis. Oleh sebab itu, analisis dalam penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan formal, tetapi juga pada dinamika persepsi, aktor, serta keseimbangan kepentingan.

Posisi Indonesia dalam Kawasan Indo-Pasifik

Sebagai negara yang memiliki kepentingan besar atas stabilitas di Laut China Selatan dan alur pelayaran internasional, Indonesia dihadapkan pada dilema antara memperkuat kerja sama pertahanan dengan China dan menjaga independensi strategis. Oleh karena itu, kerangka analitik dalam studi ini juga memperhatikan faktor-faktor kawasan, seperti doktrin Indo-Pasifik yang diusung Amerika Serikat, intensitas kehadiran militer China, serta sensitivitas domestik terhadap campur tangan asing di sektor pertahanan.

Dengan menggunakan pendekatan diplomasi pertahanan, teori *strategic hedging*, serta analisis hubungan asimetris, penelitian ini berupaya membedah realitas kerja sama pertahanan Indonesia-China secara holistik tidak hanya sebagai kebijakan luar negeri teknokratis, tetapi juga sebagai arena politik strategis yang sarat kepentingan dan negosiasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan maksud untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pola kerja sama pertahanan antara Indonesia dan China pada periode 2022-2024. Model ini dipilih karena sesuai untuk mengungkap makna, motif, dan dinamika sosial-politik di balik kebijakan luar negeri dan aktivitas diplomatik yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Pendekatan ini mengutamakan proses dan kedalaman analisis atas fenomena, bukan pengujian hipotesis sebagaimana pada metode kuantitatif.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang dikategorikan menjadi data primer dan data sekunder.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada para informan yang memiliki pemahaman, pengalaman, atau keterlibatan langsung dalam hubungan pertahanan bilateral Indonesia-China. Informan yang diwawancarai meliputi dosen hubungan internasional, analis pertahanan dari lembaga think-tank, serta pejabat aktif maupun purnawirawan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, termasuk dokumen resmi pemerintah, laporan tahunan kementerian terkait, publikasi jurnal ilmiah, berita media arus utama, dan rilis resmi dari institusi terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan

lembaga pertahanan China. Data ini melengkapi dan memperkaya informasi dari wawancara, serta menjadi dasar dalam melakukan triangulasi terhadap hasil temuan di lapangan.

Pemilihan sumber dilakukan secara purposif dan didasarkan pada relevansi serta tingkat keterlibatannya terhadap kasus yang diteliti, sesuai dengan standar penelitian kualitatif yang mengutamakan kualitas data ketimbang jumlah.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga metode utama, yakni: Peneliti mengakses dan menganalisis berbagai dokumen resmi seperti nota diplomatik, MoU (Memorandum of Understanding), laporan hasil pertemuan bilateral, transkrip, konferensi pers, dan pernyataan bersama dari pejabat tinggi pertahanan Indonesia dan China. Dokumen-dokumen ini menjadi landasan untuk memahami arah kebijakan serta bentuk kerja sama yang telah dilakukan. Observasi Tidak Langsung Observasi dilakukan dengan mengamati perkembangan kerja sama pertahanan yang terpublikasi melalui media daring, laporan lembaga internasional, dan pernyataan pers yang menggambarkan interaksi antara kedua negara. Meski tidak dilakukan secara langsung di lapangan, observasi ini tetap valid dalam studi kebijakan, khususnya bila bersumber dari kanal resmi dan terverifikasi. Wawancara Semi-Terstruktur Wawancara dilakukan secara fleksibel namun terarah, dengan panduan pertanyaan yang disusun terlebih dahulu, sambil tetap membuka ruang eksplorasi lebih dalam. Pendekatan semi-terstruktur ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang kontekstual, reflektif, dan kadang tidak tertulis dalam dokumen resmi. Selain itu, wawancara juga menjadi sarana untuk menguji kesesuaian antara informasi dokumentatif dengan persepsi pelaku atau pengamat kebijakan.

Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yaitu dengan cara mengidentifikasi pola, kategori, dan makna dari berbagai informasi yang tersedia. Peneliti mengklasifikasikan data berdasarkan tema-tema utama seperti bentuk kerja sama, motif politik, dinamika kawasan, serta tantangan implementasi. Analisis ini berlangsung secara induktif, di mana temuan yang muncul dari data dibentuk menjadi kategori analisis.

Untuk menjaga validitas dan keandalan data, digunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Informasi dari wawancara dikonfirmasi ulang dengan dokumen atau observasi, dan sebaliknya. Dengan demikian, hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, serta merepresentasikan kenyataan empiris yang lebih utuh dan berlapis.

PEMBAHASAN

A. Paradoks Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Rivalitas Global

Indonesia menghadapi dilema klasik dalam dinamika pertahanan regional: bagaimana menjaga kedaulatan dan meningkatkan kapabilitas militer tanpa terseret ke dalam rivalitas kekuatan besar. Sebagai negara nonblok dengan prinsip bebas aktif, Indonesia kerap berada dalam posisi strategis sekaligus rentan. Kerja sama pertahanan dengan China mencerminkan bentuk strategic hedging, yaitu strategi menyeimbangkan hubungan dengan semua pihak tanpa berkomitmen pada satu aliansi.

Namun, dalam praktiknya, posisi ini tidak selalu netral. Ada kepentingan tersembunyi yang dimainkan, baik oleh China yang ingin memperluas pengaruhnya melalui soft security engagement, maupun oleh Indonesia yang ingin memanfaatkan hubungan ini untuk memperkuat pertahanan nasional dengan biaya politik serendah mungkin. Di sinilah muncul paradoks: kerja sama pertahanan yang dibangun untuk memperkuat kedaulatan, justru bisa membuka ruang ketergantungan strategis.

B. Bentuk Kerja Sama dan Taktik Hedging Indonesia

1. Dialog dan Pertemuan Strategis: Ruang untuk Bargaining

Forum seperti High-Level Committee (HLC) dan pertemuan bilateral Indonesia–China bukan sekadar bentuk komunikasi diplomatik. Forum ini menjadi arena tawar-menawar strategis, di mana Indonesia berusaha menegaskan batas wilayah, memperjuangkan netralitas, dan memastikan bahwa kerja sama tidak berujung pada dominasi. Namun, absennya dokumen transparan dari beberapa pertemuan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana posisi Indonesia benar-benar diuntungkan.

2. Latihan Militer Bersama: Simbol Trust atau Ancaman Implisit?

Latihan militer seperti *Latma Sharp Knife* menjadi simbol peningkatan kepercayaan, tetapi juga menimbulkan potensi resistensi internal. Apakah PLA (People's Liberation Army) melakukan latihan hanya sebagai ajang pelatihan bersama, atau sebagai upaya menormalisasi kehadiran militernya di kawasan yang dekat dengan sengketa Laut China Selatan? Bagi Indonesia, ini merupakan ujian dalam menjaga keseimbangan antara membangun interoperabilitas militer dan menjaga persepsi publik domestik.

3. Pendidikan dan Pertukaran Perwira: Jalur Diplomasi Kultural atau Pengaruh Ideologis?

Pertukaran perwira militer ke China membuka peluang pertukaran pengetahuan dan teknologi. Namun, perlu dipertanyakan: sejauh mana kurikulum pendidikan militer di China sinkron dengan visi TNI yang berorientasi pada demokrasi dan supremasi sipil? Adakah potensi infiltrasi pemikiran strategis yang tidak sejalan dengan nilai dasar pertahanan Indonesia?

4. Industri Pertahanan dan Teknologi: Antara Efisiensi dan Ketergantungan

Pembelian alutsista dari China memang menawarkan harga yang kompetitif, namun tingkat transfer teknologi (ToT) yang rendah menimbulkan kekhawatiran. Alih-alih memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional, kerja sama ini bisa melanggengkan

ketergantungan terhadap teknologi asing yang sulit diaudit secara independen. Dalam konteks ini, hedging yang semula bertujuan memperkuat posisi Indonesia, justru berpotensi menjadi bumerang strategis.

C. Ketegangan antara Netralitas dan Kepentingan Ekonomi-Politik

Indonesia berada dalam tekanan geopolitik yang intens. Di satu sisi, China adalah mitra dagang terbesar, investor utama dalam proyek strategis seperti Belt and Road Initiative (BRI), dan juga kekuatan militer yang tengah naik daun. Di sisi lain, Indonesia harus tetap menjaga

hubungan erat dengan Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara ASEAN lainnya yang bersikap skeptis terhadap ekspansi Tiongkok.

Kerja sama pertahanan dengan China mengindikasikan pergeseran arah netralitas Indonesia menjadi pragmatis, di mana keputusan strategis diambil bukan berdasarkan ideologi nonblok, melainkan berdasarkan kepentingan jangka pendek, seperti akses teknologi atau stabilitas domestik. Di sini muncul dilema serius: apakah Indonesia benar-benar menjaga kedaulatan, atau sedang terjebak dalam politik keseimbangan yang rapuh?

D. Resistensi dan Ketidakpercayaan Domestik

Salah satu indikator penting dari ketidakstabilan kerja sama pertahanan adalah adanya resistensi internal. Banyak kalangan akademik dan parlemen mempertanyakan orientasi kerja sama ini. Isu mengenai kurangnya transparansi, dominasi teknologi China, dan ketidakhadiran pengawasan legislatif terhadap kesepakatan bilateral menjadi sorotan. Bahkan, sebagian kalangan menyebut kerja sama ini sebagai bentuk *soft penetration* pertahanan oleh China terhadap Indonesia. Lebih dari itu, ada juga kekhawatiran ideologis-bahwa perwira muda yang dikirim ke China bisa mengalami indoktrinasi strategis atau pengaruh yang tidak selaras dengan nilai Pancasila dan demokrasi sipil yang dijunjung oleh TNI.

E. Implikasi Strategis: Manuver atau Ketergantungan?

Kerja sama pertahanan yang semula dimaksudkan untuk memperluas manuver Indonesia di panggung internasional ternyata menyimpan potensi ketergantungan jangka panjang. Ketika ToT (transfer of technology) tidak terjadi, ketika interoperabilitas hanya berlaku secara teknis tanpa landasan doktrinal yang kuat, maka kerja sama semacam ini berisiko hanya menjadi pembelian senjata yang dibungkus diplomasi. Bahkan, beberapa pengamat mencatat bahwa kerja sama pertahanan yang terlalu "lembut" dengan China bisa melemahkan posisi Indonesia dalam menghadapi tekanan di Laut Natuna Utara. Jika tidak dikawal secara tegas, hubungan ini bisa melunturkan posisi Indonesia sebagai pemimpin de facto ASEAN dalam isu keamanan maritim.

F. Evaluasi Terhadap Pendekatan Hedging Indonesia

Pendekatan strategic hedging Indonesia sejauh ini cukup berhasil dalam menghindari ketegangan langsung dengan kekuatan besar. Namun, pendekatan ini juga rentan terhadap manipulasi, khususnya dari negara seperti China yang memiliki kapasitas ekonomi, militer, dan

diplomasi yang kuat. Agar tidak terjebak dalam jebakan diplomasi simbolik (*symbolic hedging*), Indonesia perlu memperjelas batas, tujuan, dan indikator keberhasilan dari setiap kerja sama pertahanan. Pendekatan *hedging* yang tidak disertai dengan kontrol strategis akan menjadikan Indonesia hanya sebagai "mitra lemah" yang dimanfaatkan dalam *grand strategy* negara mitra.

G. Jalan Ke Depan: Reorientasi Strategi Pertahanan

Untuk mengoptimalkan kerja sama pertahanan dengan China tanpa mengorbankan kedaulatan, Indonesia perlu:

1. Meningkatkan transparansi publik terhadap seluruh bentuk kerja sama pertahanan;
2. Memperkuat kapasitas negosiasi teknokratik dalam menyusun kerja sama militer;
3. Memastikan bahwa kerja sama selalu sejalan dengan Rencana Strategis TNI dan UU Pertahanan;
4. Mengembangkan kerja sama trilateral atau multilateral agar tidak terlalu tergantung pada satu mitra;
5. Memanfaatkan ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM) dan ADMM-Plus untuk memperluas ruang diplomasi pertahanan regional yang kolektif dan seimbang.

H. Perbandingan Strategi Hedging Indonesia terhadap China dan Amerika Serikat

Salah satu indikator keberhasilan *strategic hedging* adalah kemampuan suatu negara untuk menjaga hubungan saling menguntungkan dengan dua kekuatan besar tanpa terseret ke dalam blok tertentu. Dalam konteks ini, perbandingan antara kerja sama pertahanan Indonesia dengan China dan dengan Amerika Serikat menjadi penting.

Kerja sama Indonesia AS lebih dominan dalam bentuk pelatihan militer, peningkatan interoperabilitas, dan dukungan logistik. Sementara kerja sama dengan China cenderung terfokus pada pengadaan alutsista dan kerja sama industri pertahanan. Strategi ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menjaga *equilibrium*, tetapi ketimpangan dalam kontrol dan transparansi lebih terasa dalam kerja sama dengan China. Di sinilah letak risiko: jika Indonesia terlalu pragmatis terhadap China karena iming-iming bantuan teknologi dan dana, maka nilai-nilai demokrasi dan sistem komando TNI yang berlandaskan supremasi sipil bisa terkikis.

Subbagian ini juga menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya memiliki standar evaluasi kebijakan pertahanan antar mitra secara seimbang, dan ini berpotensi melemahkan posisi tawar dalam jangka panjang.

I. Implikasi Kerja Sama terhadap Keamanan Regional ASEAN

Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, posisi Indonesia dalam ASEAN tidak bisa dilepaskan dari dinamika hubungan bilateralnya dengan China. Beberapa negara anggota ASEAN, seperti Vietnam dan Filipina, sangat skeptis terhadap ekspansi militer China di Laut

China Selatan. Dalam konteks ini, kerja sama pertahanan Indonesia China menjadi perhatian karena bisa menimbulkan kesan bahwa Indonesia mulai condong ke satu kutub tertentu.

Secara resmi, Indonesia menolak klaim 9 dash line dan tetap aktif dalam ADMM dan ADMM-Plus. Namun, peningkatan intensitas kerja sama bilateral Indonesia–China tanpa diimbangi dengan inisiatif kolektif ASEAN dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam kawasan. Dengan kata lain, kerja sama ini tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral, tetapi juga bisa mempengaruhi kohesi dan konsensus dalam ASEAN Security Community.

J. Dimensi Ideologis dan Soft Power dalam Diplomasi Pertahanan

China tidak hanya menawarkan kerja sama teknis dan ekonomi, tetapi juga menyisipkan elemen soft power dalam pendekatan pertahanannya. Pertukaran perwira, kunjungan kenegaraan militer, hingga keterlibatan dalam forum keamanan multilateral adalah bagian dari strategi membentuk narasi keamanan regional versi Tiongkok. Di sinilah diplomasi pertahanan berubah dari sekadar taktik militer menjadi bagian dari kontestasi narasi global. Indonesia harus waspada terhadap soft power yang tidak netral, khususnya jika pendidikan militer atau pelatihan teknis membawa serta muatan ideologis dan persepsi yang berbeda dari doktrin TNI. Tanpa pengawasan dan mekanisme kontrol yang memadai, Indonesia bisa terjebak pada pengaruh naratif yang melemahkan posisi strategisnya di Indo-Pasifik.

KESIMPULAN

Kerja sama pertahanan Indonesia dan China tahun 2022-2024 mencerminkan pendekatan strategis Indonesia dalam menghadapi rivalitas global, melalui strategi *strategic hedging* dan diplomasi pertahanan. Upaya menjaga keseimbangan antara memperkuat kapabilitas militer dan menjaga prinsip non-aliansi dilakukan dengan membangun berbagai bentuk kerja sama, mulai dari dialog bilateral, latihan militer bersama, pendidikan perwira, hingga pengadaan alutsista.

Namun, kerja sama ini memunculkan dilema strategis yang kompleks. Di satu sisi, hubungan tersebut membuka peluang peningkatan kapasitas pertahanan dan efisiensi anggaran. Di sisi lain, Indonesia dihadapkan pada potensi ketergantungan, ketimpangan teknologi, dan resistensi internal akibat keterbatasan transparansi serta potensi penetrasi ideologis. Pembahasan yang diperluas juga mengungkap bahwa kerja sama ini memiliki implikasi terhadap postur Indonesia dalam ASEAN, serta menunjukkan perbedaan mendasar antara strategi hedging terhadap China dan Amerika Serikat.

Melalui kerangka analitik yang digunakan, disimpulkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya mampu menjadikan kerja sama ini sebagai instrumen kemandirian strategis. Strategi hedging yang diadopsi masih bersifat defensif, dan kurang didukung oleh evaluasi internal serta sistem pengawasan kebijakan yang adaptif terhadap konteks regional.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan arah diplomasi pertahanan Indonesia, termasuk perluasan kerja sama trilateral/multilateral, penyusunan indikator keberhasilan diplomasi pertahanan, serta penguatan kapasitas teknokratik dalam negosiasi. Ke depan, studi lanjutan penting dilakukan dengan membandingkan kerja sama pertahanan Indonesia dengan berbagai mitra strategis dalam konteks transformasi keamanan Indo-Pasifik dan dinamika regional ASEAN, termasuk dimensi ideologis dan soft power yang semakin berperan dalam interaksi antar negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Disertasi

- Nye, J. S. (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. PublicAffairs.
- Sukma, R. (2011). *Indonesia's Foreign Policy and the Dilemma of Dependence: Searching for Autonomy in an Interdependent World*. Routledge.

Jurnal Ilmiah

- Agus, S. (2022). Perkembangan Hubungan Bilateral Indonesia–China di Bidang Pertahanan 2015–2021. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(2), 112–129. <https://doi.org/10.22146/jsp.66234>
- Kuik, C. C. (2008). The Essence of Hedging: Malaysia and Singapore's Response to a Rising China. *Contemporary Southeast Asia*, 30(2), 159–185. <https://doi.org/10.1355/cs30-2b>
- Prawira, A., & Wibowo, R. (2023). Diplomasi Pertahanan dan Transformasi Postur Militer Indonesia. *Jurnal Strategi Pertahanan*, 9(1), 45–67. <https://doi.org/10.53073/jsp.v9i1.452>
- Putri, S. N. (2021). Strategi Hedging Indonesia dalam Hubungan Pertahanan dengan China. *Jurnal Global dan Strategis*, 15(1), 75–92. <https://doi.org/10.7454/global.v15i1.1574>
- Santoso, E. (2020). Peran ASEAN dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Kawasan Indo-Pasifik. *Jurnal Hubungan Internasional*, 8(2), 123–138. <https://doi.org/10.24843/jhi.2020.v8.i2.p3>
- Yani, Y. M. (2019). Diplomasi Pertahanan Indonesia: Dari Soft Power ke Smart Power. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 9(3), 55–73. <https://doi.org/10.33172/jpbn.v9i3.650>

Terbitan Resmi / Laporan / Undang-Undang

- DPR RI. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 186.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2022). *Rencana Strategis Kementerian Pertahanan Tahun 2020–2024*. Jakarta: Kemhan.

Ministry of Defense of the Republic of Indonesia. (2021). *Indonesia Defense White Paper*. Jakarta: MoD.